



MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY) DALAM PERSPEKTIF BUDDHISME

Pratna Dian Pratiwi¹

STABN Sriwijaya

pratna.dp12@gmail.com

Pramudita Mei Nata²

STABN Sriwijaya

prmditaaa@gmail.com

Krisdiantoro Alfani Bramantio³

STABN Sriwijaya

krisdiantoroalfanibramantio@gmail.com

Sutadi⁴

STABN Sriwijaya

tugaskitasw@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 07-12-2023

Direvisi: 27-12-2023

Diterbitkan: 30-12-2023

Doi:

Abstract:

In Indonesia, the growth and development of civil society is necessary, but so far, the formation of civil society in Indonesia is not optimal. In this regard, the Buddha taught hiri and ottapa in his teachings as a basis for himself to cultivate the qualities of legal consciousness, so the researchers wanted to study civil society from a perspective of Buddhism. To carry out this research, researchers use the methods of library research. That is, it collects library data, reads, records, and processes research materials. Therefore, researchers will use the primary sources of Tipitaka pali and the secondary sources obtained from the opinions and discussions of other authors to investigate Tipitaka in detail in relation to civil society. The result of this study is that the formation of civil society from a Buddhism point of view must meet the criteria associated with the seven principles of Vajji, Hiri and Ottapa form a civil society. Thus, it can be concluded that a civil society in the perspective of Buddhism is a civilized society that is capable of developing science, realizing hiri and ottapa, and fulfilling the requirements for the formation of a civil society.

Keywords: *civil society, perspective, buddhism.*

Abstrak:

Di Indonesia membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani (civil society), akan tetapi hingga saat ini pembentukan masyarakat madani di Indonesia masih kurang optimal. Berkenaan dengan hal tersebut dalam ajarannya Buddha mengajarkan mengenai hiri dan ottapa sebagai landasan diri dalam menumbuhkan karakteristik sadar hukum, oleh karena itu peneliti merasa tertarik dengan hal tersebut sehingga peneliti ingin melakukan kajian mengenai masyarakat madani (civil society) dalam perspektif Buddhisme.

Untuk melakukan kajian ini peneliti menggunakan metode *library research* atau kajian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, dengan demikian peneliti akan mengkaji Tipitaka secara mendalam yang berkaitan dengan masyarakat madani (*civil society*) melalui sumber primer dari Tipitaka pali dan sekunder yang berasal dari pendapat maupun pembahasan penulis lain. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pembentukan masyarakat madani (*civil society*) dalam persepektif Buddhisme membutuhkan pemenuhan terhadap kriteria merujuk pada 7 (tujuh) prinsip suku Vajji, hiri, dan ottapa yang ditunjang dengan pemenuhan prasyarat dalam membentuk masyarakat yang madani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang madani dalam persepektif Buddhisme adalah masyarakat beradab yang mumpuni dalam perkembangan ilmu pengetahuan, merealisasi hiri dan ottapa, serta memenuhi syarat-syarat pembentukan masyarakat yang madani (*civil society*).

Kata kunci: masyarakat madani, perspektif, buddhisme.

Pendahuluan

Setiap masyarakat berbangsa dan bernegara pasti menginginkan adanya kesejahteraan dalam kehidupannya. Suroto (2015: 666) menyatakan “secara umum masyarakat madani atau *civil society* dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi”. Di Indonesia membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani dalam era globalisasi, pengembangan masyarakat madani tidak terlepas dari keadaan bangsa Indonesia yang masih mengalami kasus kemiskinan dari mulai zaman orde lama sampai saat ini. Besarnya angka kemiskinan yang terjadi karena beberapa faktor antara lain pemanfaatan sumber daya alam kurang maksimal, kriminalitas, kejahatan yang terjadi dimana-mana, dan belum terlaksananya birokrasi di Indonesia.

Masyarakat madani (*civil society*) memiliki ciri khas yaitu kemandirian dan kepercayaan diri dalam berdemokrasi namun tertib dan sadar hukum. Pada salah satu ciri masyarakat madani yaitu beradab yang tinggi dimana sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika masyarakat beradab maka akan timbul rasa enggan untuk melakukan hal-hal yang di luar norma kemanusiaan yang dapat mengganggu stabilitas bangsa dan negara. Namun, di Indonesia masih terdapat kasus-kasus belum terpenuhinya standarisasi birokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, intoleransi, dan demonstarasi berujung tindakan anarkis.

Dilansir dari surat kabar berita online [suarasurabaya.net](https://www.suarasurabaya.net) “Perjuangan Yaidah Warga Surabaya ke Kemendagri Urus Akta Kematian Anaknya” tentang birokrasi di Indonesia (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/perjuangan-yaidah-warga-surabaya-ke-kemendagri-urus-akta-kematian-anaknya/>) menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih angkuh dan berjarak dengan masyarakat. Selain itu, sesungguhnya dalam kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa Yaidah merupakan masyarakat yang berani memperjuangkan haknya. Kasus yang sama juga terjadi pada kasus nenek Minah. Dilansir dari surat kabar berita online detikNews berjudul “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari” (<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah->

dihukum-1-bulan-15-hari) menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih terasa tajam di bawah dan tumpul di atas.

Selanjutnya, selain birokrasi di Indonesia yang masih lemah, berdasarkan hasil pencarian dalam surat kabar berita *online* pada *website* kompaspedia.kompas.id (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/mengenang-marsinah-aktivis-buruh-yang-tewas-mengenaskan>) dengan tajuk berita yaitu "Mengenang Marsinah Aktivis Buruh Yang Tewas Mengenaskan" menunjukkan masih terdapat kasus belum terpenuhinya HAM di Indonesia. Ketika Marsinah hendak memperjuangkan haknya dia justru malah dibungkam dengan diperkosa lalu dibunuh. Hal tersebut tentu memerlukan perhatian khusus, dimana masyarakat hendaknya menyuarakan suaranya dalam menanggapi kasus-kasus tersebut. Namun, di dalam lingkungan masyarakat sendiri sering terjadi konflik karena adanya intoleransi bahkan demonstrasi berujung anarkis.

Yang pertama yaitu kasus perang Suku Dayang dan Madura dimana dilansir dari surat kabar berita *online* pada laman *website* dari Kompas.com dengan tajuk berita yaitu "Konflik Sampit: Latar Belakang, Konflik, dan Penyelesaian" (<https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/090000179/konflik-sampit-latar-belakang-konflik-dan-penyelesaian?page=all#page2>) menunjukkan adanya intoleransi yang berawal dari konflik ekonomi dan perebutan wilayah. Kedua, mengenai pemboman di Surabaya juga menunjukkan kurang adanya toleransi beragama yang berujung tindak kriminal. Hal tersebut dilansir dari surat kabar berita VOI (<https://voi.id/memori/51062/pengeboman-tiga-gereja-di-surabaya-dalam-sejarah-13-mei-2018>) berjudul "Pengeboman Tiga Gereja di Surabaya dalam Sejarah 13 Mei 2018". Dari adanya kasus belum optimalnya penegakan birokrasi, HAM, dan adanya intoleransi yang mengganggu kestabilan masyarakat.

Kemudian, mengenai demonstrasi berujung anarkis dilansir dari surat kabar berita suara.com (<https://www.suara.com/news/2019/05/24/070000/kerusuhan-22-mei-dari%20korban-nyawa-hingga-terhentinya-roda-ekonomi-warga>) dengan tajuk berita "Kerusuhan 22 Mei: Dari Korban Nyawa Hingga Terhentinya Roda Ekonomi Warga" menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sering bersikap anarkis dalam berdemonstrasi. Aksi demo tersebut diperparah karena masyarakat ikut andil dalam memprovokasi aksi tersebut sehingga Kominfo membatasi penggunaan sosial media. Hal tersebut dilansir surat kabar berita online CNBC Indonesia berjudul "Tangkal Hoaks Demo 22 Mei, Kominfo Tutup 61.000 Akun WhatsApp" (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190529122807-37-75741/tangkal%20hoaks-demo-22-mei-kominfo-tutup-61000-akun-whatsapp>). Dari kasus di atas dapat terlihat bahwa masih kurang optimalnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Artinya, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkerja sama dalam menciptakan kesejahteraan bangsa melalui pembentukan masyarakat yang madani.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mukti (2003:495) menyatakan "Buddha memberikan sejumlah petunjuk untuk mengembangkan masyarakat semacam ini, yang merdeka dan sejahtera, yang menempatkan kesuciaan dan nilai-nilai luhur di atas kekuasaan." Buddha mengajarkan tentang hiri dan ottapa yang merupakan landasan diri dalam membangun karakteristik sadar hukum yang harus ada dalam diri masyarakat madani. Oleh karena itu, peneliti merasa sangat tertarik untuk

mendalami dan mengkaji lebih lanjut tentang masyarakat madani (*civil society*) dalam perspektif Buddhisme. Pengkajian penelitian ini lebih lanjut dilakukan melalui sumber primer berupa kitab suci Tipitaka pali dan sumber sekunder berupa karya ilmiah maupun sumber lain yang mendukung dengan cara yaitu membuat rumusan masalah, mengumpulkan data, membaca, mencatat, dan menarik kesimpulan.

Metode

Kajian untuk melakukan penelitian mengenai masyarakat madani (*civil society*) dalam perspektif Buddhisme ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Zed dalam Azwar (2017:15) “studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.” Langkah-langkah dalam kajian Tipitaka ini secara garis besar yaitu: (1) Menentukan judul dan membuat rumusan masalah; (2) Mengumpulkan sumber berupa sutta-sutta yang berkaitan dengan masyarakat madani (*civil society*); (3) Membaca dan memahami sutta-sutta tersebut dengan melakukan interpretasi; (4) Menarik kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan analisis teks dan interpretasi teks dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer terdiri dari Tipitaka pali, sedangkan sekunder berasal dari pendapat maupun pembahasan penulis lain mengenai masyarakat madani (*civil society*).

Analisis interpretasi data secara lengkap dalam kajian Tipitaka ini menggunakan teknik hermeneutika. Susanto (2016:1) menyatakan “Dalam tradisi Yunani Kuno kata hermeneuein dipakai dalam tiga makna yaitu “*to say, to explain, and to translate*”. Dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yakni: mengungkapkan, menerangkan, dan menerjemahkan. Menerangkan dilakukan dengan mengungkapkan nilai-nilai dalam Tipitaka terkait masyarakat madani (*civil society*) dan menjabarkan mengenai kehidupan bermasyarakat. Kemudian, menerjemahkan kata-kata yang tidak dimengerti dalam Tipitaka terkait tema masyarakat madani (*civil society*) atau kata-kata asing dalam penulisan, sehingga dapat mudah dipahami pembaca.

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian mengenai masyarakat madani (*civil society*) dalam perspektif Buddhisme adalah empat (4) bulan yang dimulai sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di kampus STAB Negeri Sriwijaya serta tempat lain yang akan mendukung berjalannya penelitian ini yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Perlengkapan yang digunakan untuk membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini yaitu laptop, buku referensi, bolpoint, pensil, kertas, dan keperluan ATK lainnya. Kemudian, sumber referensi sebagai penunjang dalam penelitian ini juga didapatkan dari *e-book* dan *e-jurnal*.

Hasil dan Diskusi

Pentingnya Menerapkan Masyarakat Madani Sebagai Masyarakat Ideal

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang terikat oleh kebudayaan dan saling berinteraksi karena adanya perasaan persatuan. Masyarakat

madani sebagai masyarakat yang beradab mampu menciptakan kesejahteraan bersama melalui toleransi dan demokrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, di zaman Buddha terdapat suku Vajji yang sering berkumpul dan bemusyawarah sehingga membuat mereka maju dan terhindar dari kemerosotan. Dalam Digha nikaya, Maha vagga, Mahaparinibbana sutta dikisahkan bahwa suku Vajji dapat menciptakan masyarakat madani melalui 7 prinsip suku Vajji. Bermula dari Raja Ajatassatu yang ingin menghancurkan suku Vajji yang berdaulat dan jaya namun gagal. Pada dasarnya penyerangan, penghancuran, pertempuran, perselisihan, dan peperangan merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan masalah karena dapat menyebabkan penderitaan dan kebencian. Dalam Dhammapada, Sikkha Vagga, syair ke-201 Buddha mengatakan bahwa kemenangan akan membawa pada kebencian, sedangkan kekalahan akan membawa pada penderitaan. Artinya, pertempuran, perselisihan, bahkan perang hanya akan berakhir pada kebencian dan penderitaan. Oleh karena itu, dalam membentuk masyarakat yang ideal penting untuk diterapkannya masyarakat madani yang menjunjung toleransi dan demokrasi khususnya di Indonesia yang masyarakatnya plural dan rawan dengan adanya konflik disintegritas.

Cara Membangun Masyarakat Yang Madani

Gagasan masyarakat madani di Indonesia harus memiliki ciri yaitu kemajemukan atau multikulturalisme dan pengertian antar sesama anggota masyarakat. Artinya, ciri dari masyarakat madani ialah adanya toleransi yang tinggi dalam diri masyarakat madani itu sendiri.

Menurut Ibrahim (2012:136-138), prasyarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan masyarakat madani ialah sebagai berikut:

1. *Free public sphere*, yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.
2. Demokratis yang merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana *civil society*.
3. Toleransi yang memungkinkan akan adanya kesadaran individu untuk menghargai, menghormati pendapat, dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Pluralisme tidak hanya dipahami dengan sikap mengakui dan menerima tetapi disertai sikap tulus untuk menerima pluralisme itu bernilai positif.
5. Keadilan sosial (*social justice*) yang merujuk pada keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban.

Terkait masyarakat madani sebagai masyarakat yang ideal, Buddha pernah mengatakan bahwa

suku Vajji sering berkumpul dan bemusyawarah sehingga membuat mereka maju dan terhindar dari kemerosotan. Dalam *Sarandada sutta (Vajjisattaka vagga, Anguttara nikaya : 26-27)* Buddha menjelaskan bahwa Raja Ajatasatu tidak bisa menaklukkan suku Vajji sebab suku Vajji menerapkan prinsip-prinsip yang membawa pada

kesejahteraan. Buddha mengatakan bahwa beliau pernah mengajarkan mengenai tujuh prinsip kepada suku Vajji. Tujuh prinsip tersebut terdiri dari :

1. Sering berkumpul dan sering mengadakan pertemuan.
2. Berkumpul dengan rukun, bubar dengan rukun, dan melakukan urusan-urusan.
3. Tidak menetapkan apa pun yang belum ditetapkan atau meniadakan apa yang telah ditetapkan melainkan menjalankan dan mengikuti prinsip-prinsip kuno Vajji seperti yang telah ditetapkan.
4. Menghormati, menghargai, menjunjung, dan memuliakan para sesepuh Vajji dan berpendapat bahwa mereka seharusnya dipatuhi.
5. Tidak menculik perempuan-perempuan dan anak-anak gadis dari keluarga mereka dan memaksa mereka untuk hidup bersama.
6. Menghormati, menghargai, menjunjung, dan memuliakan altar-altar tradisi, baik yang berada di dalam kota maupun di luar kota, dan tidak mengabaikan pengorbanan baik seperti yang dipersembahkan kepada altar-altar itu di masa lalu.
7. Memberikan perlindungan baik, naungan baik, dan penjagaan baik kepada para Arahata.

Ketujuh prinsip tersebut juga menjadi kriteria yang harus dipenuhi dalam proses mewujudkan masyarakat yang madani yang juga ditunjang dengan pemenuhan pada prasyarat pembentukannya. Pada prasyarat pertama, ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat menjadi sebuah hal yang penting dalam membentuk masyarakat madani. Buddha mengatakan bahwa suku Vajji sering berkumpul dan mengadakan pertemuan. Artinya, pada saat itu suku Vajji telah memenuhi prasyarat yang pertama. Suku Vajji mengadakan pertemuan untuk membahas masalah melalui musyawarah dan melaksanakan prinsip suku Vajji yang pertama.

Dalam pemenuhan ruang publik yang bebas ini, Sang Buddha mengajarkan tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan dalam berpendapat merupakan wujud dari pemenuhan ruang publik yang bebas dalam mengeluarkan pendapat. Di dalam *Brahmajala sutta (Silakkhandha vagga, Digha nikaya: 1)*, Sang Buddha mengajarkan tentang keterbukaan terhadap perbedaan pendapat dan kritik dimana beliau sendiri mengatakan kepada para siswanya yaitu Bhikkhu Sangha agar tidak marah ataupun tersinggung ketika ada yang menghina Buddha Dhamma karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai kritik untuk membenahi diri. Terkait hal tersebut Buddha juga mengajarkan kebebasan dalam menyatakan pendapat dalam *Mahavagga (Khandhaka, Vinaya pitaka IV: 107)*.

Buddha tidak memaksakan para Bhikkhu untuk bertanya ataupun tidak ketika mereka bahkan tahu bahwa waktu tersebut ialah waktu yang tepat untuk bertanya. Hal tersebut pada akhirnya juga berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimana masyarakat yang madani menyelesaikan masalah dengan mengadakan pertemuan dan bermusyawarah mufakat yang ditunjang dengan adanya ruang publik yang bebas. Pada prasyarat yang kedua, demokratis

menjadi satu entitas penegak wacana civil society atau masyarakat madani ditunjukkan dengan masyarakat yang menunjukkan sikap-sikap yang demokratis. Suku Vajji yang menerapkan tujuh prinsip yang diajarkan Buddha menunjukkan hal tersebut pada prinsip yang kedua.

Kemudian, dalam *Agganna Sutta (Patika vagga, Digha Nikaya: 27)* Buddha mengajarkan kepada muridnya bahwa meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda namun mereka tetaplah muridnya. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa Buddha tidak hanya mengajarkan untuk bersikap demokratis yang merujuk pada aspek kesejahteraan bersama tapi juga dalam pelaksanaannya meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan demokrasi yang sebenarnya karena demokrasi dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Prasyarat yang ketiga yaitu toleransi yang memungkinkan akan adanya kesadaran individu untuk menghargai, menghormati pendapat, dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pada prinsip suku Vajji yang keempat dikatakan bahwa suku Vajji menghormati, menghargai, menjunjung, dan memuliakan para sesepuh mereka.

Dalam prinsip ketiga suku Vajji, dikatakan bahwa suku Vajji menjalankan dan mengikuti prinsip-prinsip kuno Vajji seperti yang telah ditetapkan karena dapat membawa kesejahteraan bagi suku mereka. Dalam *Cakkavati-Sahanada sutta (Patika vagga, Digha nikaya: 405)* terdapat sebuah kisah dimana Raja Cakkavati tidak melaksanakan kewajiban sebagai Maharaja suci seperti pendahulu-pendahulunya dan membuat aturannya sendiri. Akibatnya terjadi kemiskinan yang berujung maraknya pencurian oleh rakyatnya. Hal tersebut menunjukkan selagi aturan lama yang berasal dari para pendahulu meskipun terlihat kolot apabila bisa membawa pada kesejahteraan bersama maka hendaknya tetap dipertahankan. Hal tersebut kemudian juga haruslah diterapkan oleh masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang madani.

Prasyarat keempat, pluralisme tidak hanya dipahami dengan sikap mengakui dan menerima tetapi disertai sikap tulus untuk menerima pluralisme itu bernilai positif. Artinya, masyarakat madani tidak hanya memahami dengan sikap mengakui dan menerima terhadap perbedaan saja, namun juga disertai sikap tulus pluralisme tersebut selagi hal tersebut bernilai positif. Masyarakat madani dalam persepektif Buddhisme terkait prasyarat yang keempat ditunjukkan dengan merealisasi prinsip keenam dan ketujuh dari suku Vajji sebagai kriteria masyarakat yang madani. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi maka prasyarat yang keempat ini juga akan terpenuhi.

Pada prinsip keenam suku Vajji dikatakan bahwa suku Vajji senantiasa menghormati, menghargai, menjunjung, dan memuliakan altar-altar tradisi. Baik yang berada di dalam kota maupun di luar kota. Mereka tidak mengabaikan pengorbanan baik seperti yang dipersembahkan kepada altar-altar itu di masa lalu. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam konteks masa kini maka hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa suku Vajji menunjukkan sikap tulus dengan menghargai agama orang lain, meskipun mereka teguh terhadap keyakinan atau agama mereka sendiri.

Dalam *Kalama Sutta (Mahavagga, Tika nipata, Anguttara nikaya: 339)* Buddha juga mengajarkan untuk terbuka terhadap ajaran lain. Untuk mendapatkan sebuah kebenaran dalam suatu ajaran harus dilihat dan dibuktikan sendiri oleh diri sendiri. Ketika ajaran yang diajarkan dapat diketahui dengan membuktikannya sendiri akan mengarahkan pada kesejahteraan. Kemudian, masyarakat yang madani dalam perspektif Buddhisme mengacu pada prinsip ketujuh suku Vajji dan prasyarat yang keempat yakni ialah suku Vajji dikatakan senantiasa memberikan perlindungan dan naungan kepada para arahat.

Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam proses mewujudkan masyarakat yang madani dengan memberikan perlindungan, nauangan, dan penjagaan yang baik bagi pemuka agama. Buddha juga mengajarkan hal tersebut dalam *Sigalaka Sutta (Digha Nikaya :492)*. Selanjutnya, prasyarat terakhir yang harus dipenuhi dalam pembentukan masyarakat madani adalah keadilan sosial (*social justice*) yang merujuk pada keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban. Pada prinsip kelima suku Vajji dikatakan bahwa suku Vajji tidak menculik perempuan-perempuan dan anak-anak gadis dari keluarga mereka dan memaksa mereka untuk hidup bersama. Artinya, pada zaman itu suku Vajji bahkan telah memahami bahwa tindakan penculikan dan pemaksaan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain dan pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Hal tersebut harus dipenuhi dalam proses mewujudkan masyarakat yang madani.

Dewasa ini, tindakan kriminalitas merujuk pada perbuatan amoral yang dapat dilakukan yang mana korbannya adalah seorang wanita. Perbuatan amoral merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral, yang tidak berlandaskan dengan ajaran Sang Buddha seperti pancasila Buddhis. Perbuatan amoral seperti tindak kriminalitas tidak akan terjadi apabila seseorang menerapkan *hiri* dan *ottapa* dalam dirinya dimana *hiri* memiliki arti malu untuk berbuat jahat dan *ottapa* memiliki arti takut akan akibat perbuatan jahat. Ajaran Sang Buddha mengenai *hiri* dan *ottapa* terdapat dalam *Dhammasanghani (Suttantamatika: xxi), Lokapala sutta (Kammakarana vagga, Anguttara Nikaya)*. Tanpa adanya *Hiri* dan *ottapa* merupakan pelindung dunia yang apabila dibawa ke ranah kehidupan bermasyarakat bahkan bernegara akan membawa pada terwujudnya masyarakat yang madani.

Dengan demikian, dalam perspektif Buddhisme solusi yang ditawarkan dalam proses mewujudkan masyarakat yang madani (*civil society*) adalah dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbukaan dan kebebasan dalam pendapat dan kritik sebagai pemenuhan ruang publik yang bebas.
- 2) Mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
- 3) Menerima perbedaan pandangan.
- 4) Sikap toleran direalisasi dalam bentuk saling menghormati dan menghargai.
- 5) Menghindari pelanggaran dan menjadi masyarakat yang taat hukum.
- 6) Bersikap baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan.

7) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dampak Terbentuknya Masyarakat Madani Pada Stabilitas Masyarakat

Masyarakat madani adalah masyarakat yang ideal dan berperadaban. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang modern memiliki landasan diri pada prinsip moralitas. Dimana masyarakat memiliki hak dan kewajiban namun tetap mematuhi aturan yang berlaku. Apabila masyarakat tidak memiliki moralitas dalam diri bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik yang berakibat pada terganggunya stabilitas di masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat berperan penting satu sama lain untuk menjaga keseimbangan negara oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dan kesadaran dari masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan. Dalam *Digha Nikaya, Silakkhandhavagga, Kutadanta Sutta* Buddha mengajarkan mengenai perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu pemerintahan. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan hubungan sebab akibat yang saling bergantung. Dalam *Samyutta nikaya, Nidana samyutta, Nidana vagga, Paticcasamuppada Sutta*, Buddha mengajarkan mengenai hukum sebab musabab yang saling bergantung.

Artinya, dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik perlu didukung dengan adanya peranan dari masyarakat yang baik pula. Tindakan kriminalitas yang seringkali terjadi dapat terjadi karena belum terbentuknya masyarakat yang madani. Masyarakat madani dapat menekan hal tersebut dengan prinsip moralitasnya. Buddha mengajarkan moralitas dan pengendaliannya dalam *Vinaya Pitaka IV (Mahavagga, Khandaka: 178)* dan *Vinaya Pitaka IV (Mahavagga, Khandaka: 692)* dimana apabila seseorang memahami moralitas maka akan dengan mudah mengendalikan diri sendiri untuk tidak berbuat jahat. Masyarakat yang memiliki moral baik maka akan tercipta suatu kondisi yang membawa pada perdamaian, yang mana tidak akan ada lagi konflik maupun perselisihan yang terjadi dalam golongan masyarakat.

Dalam persepektif Buddhisme, masyarakat madani yang berpegang teguh pada pancasila Buddhis melalui landasan hiri dan ottapa sejalan dengan pancasila dasar negara. Dengan *hiri* dan *ottapa* sebagai landasan diri masyarakat madani menekan tindak kriminalitas dimulai dari dirinya sendiri. Kemudian, dengan kesadaran untuk kesejahteraan bersama, masyarakat madani dapat berperan secara optimal dalam hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat madani yang menjunjung tinggi toleransi dapat menekan konflik-konflik dalam masyarakat yang sering kali terjadi karena adanya intoleransi.

Masyarakat yang memiliki moral dapat membawa pada suatu kondisi yang damai dan menciptakan kestabilan masyarakat. Artinya, terlihat bahwa terbentuknya masyarakat madani dapat menciptakan kestabilan masyarakat dengan menekan konflik yang muncul dalam masyarakat melalui moralitas, toleransi, dan pelaksanaan demokrasi. Dimana hal tersebut dilaksanakan dengan kerukunan dan tujuan kesejahteraan bersama. Ketika masyarakat stabil maka masyarakat dapat mengambil peran dalam kerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan.

Masyarakat yang stabil dapat menyadari hak dan kewajibannya di dalam pemerintahan dan demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Kesimpulan

Masyarakat adalah sekumpulan orang atau individu dalam suatu wilayah yang sama yang memiliki persamaan dan terikat oleh kebudayaan dan saling berinteraksi karena adanya perasaan persatuan. Persatuan sebagai bentuk dari toleransi menjadi hal penting dalam membentuk interaksi masyarakat. Sedangkan masyarakat madani adalah masyarakat sipil yang beradab, masyarakat madani sebagai masyarakat yang modern memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang ditompang dengan iman pada ajaran di dalam keyakinannya. Dengan adanya masyarakat madani dalam perspektif Buddhisme dapat menciptakan masyarakat yang stabil melalui toleransi harus diterapkan di lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana yang terjadi pada suku Vajji sebagai gambaran masyarakat madani di zaman Buddha. Terbentuknya masyarakat madani harus terdapat keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Solusi yang ditawarkan agar terwujudnya masyarakat yang madani dalam perspektif Buddhisme yaitu adanya keterbukaan dan kebebasan terhadap pendapat dan kritik, demokrasi dijalankan dengan sikap yang demokratis, menerima perbedaan pandangan, sikap toleran direalisasi dalam bentuk saling menghormati dan menghargai, taat hukum, bersikap baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang juga harus menerapkan hiri dan ottapa dalam dirinya sebagai landasan diri dalam membentuk karakteristik sadar hukum. Setiap orang dalam seluruh lapisan masyarakat yang menjaga landasan hiri dan ottapa untuk menjaga kesejahteraan bersama akan memiliki sikap saling menghargai antar sesama. Ketika hal tersebut direalisasi tentu akan membawa pada terciptanya masyarakat yang madani di dalam suatu negara.

Masyarakat madani sebagai masyarakat yang memiliki landasan diri pada prinsip-prinsip moralitas menjadikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab. Ketika masyarakat memiliki moral yang baik maka akan tercipta suatu kondisi yang membawa pada perdamaian, yang mana tidak akan ada lagi konflik maupun perselisihan yang terjadi dalam golongan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat madani dapat menciptakan kestabilan masyarakat dengan menekan konflik yang muncul dalam masyarakat melalui moralitas, toleransi, dan pelaksanaan demokrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, suku Vajji sebagai gambaran dari masyarakat madani dengan 7 prinsip kesejahteraannya berhasil menjadi suku yang berdaulat dan jaya. Artinya, dengan adanya masyarakat madani yang melaksanakan demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi untuk kesejahteraan bersama dapat menekan konflik-konflik yang terjadi dan menciptakan stabilitas masyarakat. Masyarakat yang stabil dapat menyadari mengenai hak dan kewajibannya di dalam pemerintahan yang akhirnya dapat merealisasi demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Daftar Acuan

- Abidin, Z. (2020). Perjuangan Yaidah Warga Surabaya ke Kemendagri Urus Akta Kematian Anaknya : <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/perjuangan-yaidah-warga-surabaya-ke-kemendagri-urus-akta-kematian-anaknya/>.
- Azwar. (2017). Industri Televisi Dan Wajah Buram Politik Indonesia. *Komunikasi, Media Dan Informatika*. 6(2): 10-17. https://www.researchgate.net/publication/325621003_INDUSTRI_TELEVISI_DAN_WAJAH_BURAM_POLITIK_INDONESIA
- Bodhi. (2003). *Khotbah-khotbah Berkelompok Sang Buddha Terjemahan Baru Samyutta Nikaya*. Anggara, I. 2010. DhammaCitta Press. Jakarta Barat <https://pustaka.dhammadhammacitta.org/ebook/theravada/Samyutta%20Nikaya%20-%20-%20Nidana%20Vagga.pdf>
- Bodhi. (2012). *Anguttara Nikaya Khotbah-khotbah Numerikal Sang Buddha*. Anggara, I. 2015. DhammaCitta Press. Jakarta Barat. <https://pustaka.dhammadhammacitta.org/ebook/theravada/Anguttara%20Nikaya%20Jilid%201.pdf>
- Charis, I. (2015). Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Madani. *Mudarrisa*. 7(2): 229-258. <https://mudarrisa.iainsalatiga.ac.id/index.php/mudarrisa/article/view/755>
- Ibrahim, F.W. (2012). Pembentukan Masyarakat Madani Di Indonesia Melalui Civic Education. *Didaktika*. 13(1): 130-149. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/469>
- Mukti, K.W. (2003). *Wacana Buddha Dharma*. Dharma Pembangunan. Jakarta. <https://karaniya.com/product/e-book-wacana-buddha-dharma/>
- Subyandono, E. 2020. Mengenang Marsinah: Aktivis Buruh yang Tewas Mengenangkan: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/mengenang-marsinah-aktivis-buruh-yang-tewas-mengenangkan>.
- Sumedho. (1986). *Khotbah-khotbah Panjang Sang Buddha Digha Nikaya*. Tim Publikasi Giri Manggala dan Tim DhammaCitta Press. 2009. DhammaCitta. Jakarta Barat. <https://pustaka.dhammadhammacitta.org/ebook/theravada/Digha%20Nikaya%20-%20Khotbah-Khotbah%20Panjang%20Sang%20Buddha.pdf>
- Suroto. (2015). Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis). *Pendidikan Kewarganegaraan*. 5(9): 664-671. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/316/260>
- Susanto, E. (2016). *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Kencana. Jakarta. [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=BfW3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Susanto,+E.+\(2016\).+Studi+Hermeneutika+Kajian+Pengantar.+Kencana.+Jakarta.&ots=b2ES9179T3&sig=COJ4Tls8VH8bRVYNKdo6gEJmsEk](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=BfW3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Susanto,+E.+(2016).+Studi+Hermeneutika+Kajian+Pengantar.+Kencana.+Jakarta.&ots=b2ES9179T3&sig=COJ4Tls8VH8bRVYNKdo6gEJmsEk)
- Thamrin, C. (2018). *Abhidhamma-Pitaka Dhammasangani*. Edisi ke-1. Indonesia Tipitaka Center (ITC). Medan.

<https://itc-tipitaka.org/assets/tipitaka/Dhammasangani%20Full.pdf>

Wijaya, W. (2019). *Vinaya-Pitaka Volume IV (Mahavagga)*. Indonesia Tipitaka Center (ITC). Medan.

<https://itc-tipitaka.org/assets/tipitaka/Vinaya-4-Full.pdf>